Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Oleh: Ega Septianing Yudhiati

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H, MH

Alamat: Jalan Sakuntala Harapan Raya

Emai: Egaseptianingyd@gmail.com

Abstract

Crime in the community is currently in a state of fret. of the many types of crimes, murder which lately often occur. a lot of things behind someone commit robbery to murder them a sense revenge .from some homicides that occurred, can not be said again as an ordinary murder because not only kill the perpetrators also take action in the author's view is too cruel, that mutilated the victim's body and even in some cases the author analyzes motive for murder just because of jealousy. There are killers who have a symptom that indicates that someone is experiencing imbalances or failure in aligning urges constructive and destructive in itself, often called a psychopath. Psychopaths also no mention of a madman without mental disorders.

In accordance with the above description, the writer interested to do research under the title Against Judicial Review of Criminal Liability For A Psychopath In Crime Murder. Then to find out how the criminal liability and punishment on the perpetrators of the crime of murder committed by a psychopath. The last to know the limits of the law a person can be said to be a psychopath.

Results of the discussion in this paper is, first, that the criminal liability and punishment on the perpetrators of criminal acts committed murder psychopaths can account for his actions before the law under Article 338 of the Criminal Code. Then the perpetrators of the murder by category psychopaths can not be categorized as a lunatic or a disability of his soul, because he still has the power of thought in a healthy and stable, so it can be sentenced to criminal seseuai with the rules of the Code of Criminal prevailing in Indonesia at this time.

Keywords: Accountability, killing, psychopathic

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir setiap hari terjadi tindakan kejahatan, baik di kota maupun desa seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perampasan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kejahatan timbul karena ada kesempatan dan niat dari pelakunya.:

Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan yaitu pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.²

Kejahatan dikalangan masyarakat saat ini dalam kondisi meresahkan. Dari banyaknya jenis kejahatan, pembunuhanlah yang akhir-akhir ini sering terjadi. Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan pembunuhan diantaranya perampokan hingga rasa dendam. Dari beberapa kasus pembunuhan yang terjadi, tidak dapat dikatakan lagi sebagai pembunuhan biasa karena tidak hanya membunuh pelaku juga melakukan tindakan yang dalam

pandangan penulis terlampau kejam, yaitu memutilasi tubuh korbannya bahkan dari beberapa kasus yang penulis analisa motif pembunuhan hanyalah karena cemburu. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk lebih waspada.

Pembunuhan merupakan delik, penggolongan delik pembunuhan masuk kepada delik material, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.³

Dengan begitu, yang dikatakan delik pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati) yang disebabkan karena perbuatannya. Jadi, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai "delik material" ialah matinya seseorang, dimana perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.⁴

Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun sekarang telah terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis. Pembunuhan itu sendiri bermacam macam bentuknya, seperti pembunuhan karena pembelaan diri atau dalam keadaan terpaksa, pembunuhan berencana hingga pembunuhan yang dilakukan dengan cara memutilasi tubuh korban untuk menghilangkan jejak pelaku pembunuhan itu.⁵

Psikopat berasal dari kata *psyche* yang berarti jiwa dan *pathos* yang berarti penyakit. Psikopat tak sama dengan gila

³Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 2012, hlm.164.

⁴Mokhammad Najih dan Soimin, Op.Cit, hlm.164.

⁵<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5290c5c7b3bd7/bisakah-seorang-psikopat-dipidana?>, diakses pada tanggal 28 April 2015, Pukul 21.45 WIB.

¹<http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/pengertian-kejahatan-dan-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 28 April 2015, Pukul 21.45 WIB.

²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1.

(*skizofrenia/psikosis*) karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopati, pengidapnya seringkali disebut "orang gila tanpa gangguan mental."⁶

Secara mendasar, kejahatan pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338 sampai Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa. Namun dalam kenyataannya, banyak juga pelaku pembunuhan yang dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan serta pendapat para ahli yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan tersebut mengalami gangguan/kelainan kejiwaan atau psikopat yang dibebaskan.⁷ Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat?
2. Bagaimana batasan hukum seseorang yang dapat dikatakan psikopat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat.
 - b) Untuk mengetahui batasan hukum seseorang yang dapat dikatakan psikopat.
2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum khususnya di bidang tindak pidana pembunuhan oleh seorang psikopat.
- b) Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.
- c) Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak atau instansi terkait di wilayah kota pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁸

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Perbuatan itu

⁶<http://fhujiviolet.blogspot.com/p/psikopat-dengan-skizofrenia.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2015, Pukul 22.35 WIB.

⁷Hukum Online, *Op. Cit.*

⁸Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta: 1983, hlm.9.

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁰

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹¹

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹² Sementara itu, hukum pidana itu sendiri adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara. Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:¹³

- a) Mengatur masyarakat agar hak dan kepentingan terjamin;
- b) Melindungi kepentingan masyarakat;
- c) Melindungi masyarakat dari campur tangan penegak hukum yang menegakkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum

yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁴

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhinya beberapa unsure, ialah:

1. Kemampuan bertanggungjawab.
Pada Umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:
 - a) Keadaan jiwanya (tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan seperti gage, idiot, gila dan authisme, dan tidak terganggu karena terkejut seperti hipnotisme, amarah yang meluap dan latah).
 - b) Kemampuan jiwanya, (dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya,¹⁵ dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut).¹⁶
2. Hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan akan dijelaskan satu persatu dibawah ini.
 - a) Kesengajaan (*dolus*)
M.v.T dari WvSr memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang

¹⁰Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.53-54.

¹¹D.Schaffmeister, *Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Surabaya: 2007, hlm.25.

¹²Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.25.

¹³Sri Haryani Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm.60.

¹⁴Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm.75

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Soedjono Dirdjosiswono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1985, hlm.54.

dikehendaki dan diketahui. Terhadap masalah kesengajaan terdapat dua teori:¹⁷

a) Teori Kehendak (*Willstheorie*).

Teori ini diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan kerangannya tentang “*die greze von vorzatz und fahrlassigkeit*”.

Menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

Menurut teori kehendak ini adalah baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditunjukkan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai.

b) Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*).

Teori ini juga dikatakan teori

membayangkan/persangkaan. Teori ini diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan kerangannya tentang “*voorstelling und wille in der modern doluslehre*” tahun 1890 dan “*ueber den aufbaudes schulsbegriffs*” tahun

1907. Menerapkan bahwa tidaklah mungkin

sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu dapat dikehendaki, dengan kata lain perbuatannya memang dikehendaki akan tetapi akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh pembuatnya, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditunjukkan kepada perbuatan saja.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸
2. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.¹⁹
3. Psikopat berasal dari kata dasar psikopatologis, penyimpangan atau kelainan psikologis, kelainan ini terjadi sebagai akumulasi dari berbagai tressor yang diterima seseorang, tressor ini terakumulasi selama bertahun-tahun, gempuran dari stressor ini merobohkan dinding ego mechanism defence, seseorang yang digempur dengan stressor secara simultan dan spartan akan mengalami penurunan kualitas mental, kualitas kehidupan bahkan penurunan kepercayaan diri karena konsep diri yang salah.²⁰

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.1198.

¹⁹Roscoe pound, “*An Introduction to the Philosophy of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar-Maju, Bandung, 2000, hlm.65.

²⁰<http://imron46.blogspot.com/2009/09/teori-dasar-psikopat.html> , diakses pada tanggal 28 April 2015, Pukul 21.45 WIB.

¹⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1987, hlm.155-156.

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹
5. Pembunuhan secara terminology adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal adalah penelitian perpustakaan atau dokumen.²³

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normaif digunakan data skunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- b. Bahan Hukum Skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder.

4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Bahan hukum yang dikumpulkan diatas seterusnya diolah berdasarkan masalah pokok yang diteliti dengan disertai analisis, dan disajikan dalam kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti untuk selanjutnya dibahas dengan berbagai teori hukum pidana. Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode, deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dan fakta-fakta dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

²¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54.

²²<http://s-hukum.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 April 2015, Pukul 21.45 WIB.

²³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.²⁴

Menurut Wirjono Pradjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁵ Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.²⁶

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monolisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang melakukan sedangkan pandangan *monolisme* adalah pandangan yang tidak

memisahkan antara unsure-unsur mengenai perbuatan dengan unsure-unsur mengenai diri orangnya.²⁷

a). Pandangan *Dualisme*.

Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana atau *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁸ Pompe berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.²⁹

a. Pandangan *Monolisme*.

Menurut J.E Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau *wederrechtlijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya;³¹

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.7.

²⁵Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, hal.55.

²⁶Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.85.

²⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.72.

²⁸*Ibid.*

²⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.6.

³⁰*Ibid.*, hal.75

³¹R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hal.12-13.

1. Berdasarkan atas pepatah kuno, ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat member rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan.
3. Pendapat lain yang mengatakan bahwa dasar dari hukum ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

Hukum pidana merupakan bagian hukum dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang;³²

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana berisi tentang:

1. Kesalahan/*schuld*.
2. Pertanggungjawaban pidana pada diri si pelaku pembuat/*toerekeningsvadba arheid*.

Suatu Perbuatan tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apa bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;³³

1. Snyek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum;

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;

5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.³⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana

³²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.9.

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hml.211.

³⁴*Ibid.*

³⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1999, Jakarta, hlm.80.

terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁶

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsure-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut pembuat (*doder*) harus ada unsure kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:³⁷

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya

akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

C. Tinjauan umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh Paul Topinard seorang ahli Antropologi Perancis.³⁸

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi satu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.³⁹

Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:⁴⁰

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan

³⁸A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm.1

³⁹B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981, hlm.1.

⁴⁰Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.11.

³⁶*Ibid.* hlm.75

³⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1997, Jakarta, hlm.130.

- bahan penelitian para ahli kriminologi;
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut penulis akan kemukakan menurut pandangan beberapa sarjana hukum, antara lain :

1. W.A Bonger menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.⁴¹
W.A Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁴²
 - a. antropologi Kriminil, yaitu tentang orang jahat yang dapat dilihat segi tubuhnya.
 - b. Sosiologi Kriminil, pokok persoalan yang dijawab oleh bidang kriminologi ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - c. Psikologi Kriminil, yaitu dilihat dari sudut jiwanya.
 - d. Sikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
 - e. Penology, yaitu pengadilan kejahatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Psikopat

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Psikopat

Banyaknya kasus mengenai pembunuhan dengan pelaku sebagai seorang yang mengalami kelainan jiwa/psikopat tentu saja membuat resah masyarakat. Pasalnya, mereka yang mengalami kelainan jiwa/psikopat pasti membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai pasien. Namun, disisi lain mereka juga sebagai pelaku tindak kejahatan yang bahkan memakan korban yang tidak sedikit dan seharusnya dikenakan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja menjadi sorotan untuk kepolisian bagian psikologi forensik, karena di Indonesia undang-undang mengenai pelaku tindak kejahatan dengan gangguan jiwa masih belum jelas.

Dalam penelitian ini penulis lebih terfokus untuk mengupas teka-teki apakah seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengidap kelainan jiwa/psikopat dapat dipidana dan apakah pertanggungjawaban pidanya sama dengan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan namun secara kejiwaan normal. Hal yang paling penting adalah bagaimana seharusnya hukum memandang kasus seperti ini agar terlahir suatu pengaturan hukum yang tepat bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki gangguan jiwa. Karena dalam kenyataannya, penulis melihat bahwa banyaknya pendapatkalangan umum seorang yang memiliki gangguan jiwa/psikopat ini adalah sama dengan gila, maka dari itu kalangan umum tersebut berpendapat bahwa seseorang yang mengidap psikopat tidak layak dijatuhi hukuman.

Dalam proses penyidikan para tersangka terlebih dahulu akan melalui beberapa proses pemeriksaan dan keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi yang terbukti memiliki gangguan/ kelainan jiwa, dibuat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf j Kitab Undang-undang Hukum

⁴¹B. Simanjuntak. *Op.Cit.* hlm.2.

⁴²W.A. Bonger. *Op.Cit.* hlm.37.

Acara Pidana (KUHP), pasal 20 dan 21 KUHP, dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan.⁴³

Adapun gejala-gejala umum yang ada pada psikopat, yaitu sebagai berikut :

1. Sering berbohong, fasih, dan dangkal.
2. Egosentris dan menganggap dirinya hebat.
3. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Meski kadang psikopat mengakui perbuatannya namun ia sangat meremehkan atau menyangkal akibat perbuatannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli.
4. Senang melakukan pelanggaran ketika waktu kecil.
5. Sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat.
6. Kurang empati. Bagi psikopat memotong kepala ayam dan memotong kepala orang tidak ada bedanya.
7. Psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan perkelahian, jam tidur larut dan sering keluar rumah.
8. Implusif dan sulit mengendalikan diri. Untuk psikopat tidak ada waktu untuk menimbang baik buruknya tindakan yang mereka lakukan dan mereka tidak peduli pada apa yang diperbuatnya atau memikirkan tentang masa depan. Pengidap juga mudah terpicu amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik dan mudah menyerang orang hanya karena hal sepele.
9. Manipulatif dan curang. Psikopat juga sering menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak bersungguh-sungguh. Mereka juga tidak memiliki tanggapan fisiologis yang secara normal diasosiasikan dengan rasa

takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang ataupun gemetar. Pengidap psikopat tidak memiliki perasaan tersebut, karena itu psikopat seringkali disebut dengan istilah dingin.

10. Hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya.⁴⁴

Untuk mengetahui perbedaan antara orang normal dan psikopat harus melalui beberapa tahapan diagnosa, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Mencocokkan kepribadian pasien dengan 20 kriteria yang ditetapkan Prof. Hare. Pencocokan ini dilakukan dengan cara mewawancarai keluarga dan orang-orang terdekat pasien, pengaduan korban, atau pengamatan perilaku pasien dari waktu ke waktu.
2. Memeriksa kesehatan otak dan tubuh lewat pemindaian menggunakan elektroensefalogram, pencitraan resonansi magnetik, dan pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Hal ini dilakukan karena menurut penelitian gambar hasil PET (*positron emission tomography*) perbandingan orang normal, pembunuh spontan, dan pembunuh terencana berdarah dingin menunjukkan perbedaan aktivitas otak di bagian *prefrontal cortex* yang rendah. Bagian otak *lobus frontal* dipercaya sebagai bagian yang membentuk kepribadian.
3. Wawancara menggunakan metode DSM (*Diagnostic and Statistical*

⁴⁴

<http://kemonbaca.blogspot.com/2012/02/ciri-ciri-gangguan-jiwa.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2015, Pukul 11.20 WIB.

⁴⁵

<https://id.wikipedia.org/wiki/Psikopat>, diakses pada tanggal 29 Juli 2015, Pukul 13.51 WIB.

⁴³ Frangky Maitulung, Op.cit, hlm.133.

Manual of Mental Disorder) IV (*The American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* versi IV) yang dianggap berhasil untuk menentukan kepribadian antisosial.

4. Memperhatikan gejala kepribadian pasien. Biasanya sejak usia pasien 15 tahun mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan.
5. Melakukan psikotes. Psikopat biasanya memiliki IQ yang tinggi.
6. Melakukan tes pengetahuan. Psikopat biasanya memiliki pengetahuan yang luas.
7. Jika ada anak berumur 3 tahun yang terlalu genius, dan seharusnya anak tersebut tidak mungkin segenius itu, maka bisa jadi anak tersebut psikopat.

2. Sanksi Hukum Pidana Bagi Seorang Psikopat dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Ketentua hukum yang ada pada saat ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seorang yang menderita kelainan jiwa. Setelah membaca beberapa pendapat pakar hukum pidana penulis justru lebih tertarik untuk lebih mendalami masalah ini, dan penulis mendapatkan sebuah pemikiran sebagai hasil analisa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan menguraikan pernyataan para ahli hukum yang mengatakan bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Apabila ternyata perbuatan itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- c. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, ini memiliki kelemahan dalam penerapannya. Pasal 44 KUHP ini melahirkan dua perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akal nya, sehingga menurut mereka “kelainan jiwa” pun termasuk didalamnya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak dijatuhkan terhadap mereka.

Konsekuensi logisnya, yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai diatas, serta bahwa pasal ini kurang jelas dalam memberikan uraian mengenai batas kemampuan bertanggungjawab seseorang, pada praktiknya di dalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta bahwa tersangka masih dalam keadaan normal dan prima secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan ia bermasalah dalam presentase dikatakan 50% mengidap kelainan jiwa dan 50% lagi sadar secara hukum sehingga dikategorikan sebagai gila tak murni, inilah yang dimaksud dengan kelainan jiwa. Gangguan jiwa terbagi menjadi dua bagian yaitu sakit jiwa dan kelainan jiwa, yang masing-masing memiliki perngertian yang berbeda.

⁴⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Keputusan dalam pembedaan akan mempunyai koneksi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung darimana memandangnya.⁴⁷

B. Batasan Hukum Seseorang Yang Dapat Dikatakan Psikopat

1. Seseorang yang Dapat Dikatakan Psikopat Menurut Hukum

Dalam ilmu Psikiatri psikopat termasuk kedalam orang yang memiliki kelainan jiwa. Kelainan ini berupa kelainan kepribadian, seorang psikopat memiliki dua kepribadian sekaligus dalam dirinya. Dalam satu sisi terdapat suatu kerusakan fungsi otak yang mana menyebabkan suatu perilaku berlebihan. Indikator seorang psikopat hanya bisa dilihat dengan cara memeriksa kesehatan otak dan tubuh lewat pemindaian menggunakan elektroensefalogram, pencitraan resonansi magnetik, dan pemeriksaan kesehatan secara lengkap dan di sisilain fisik luar tampak seperti orang yang tidak mengidap gangguan jiwa apapun, seorang psikopat juga sadar akan perbuatannya sehingga masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam pandangan hukum tidak ada gejala gangguan jiwa berat pada diri seorang psikopat.

⁴⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.52.

Menurut hukum Indonesia, seseorang yang termasuk kedalam pengidap kelainan jiwa/psikopat adalah seseorang dengan gangguan jiwa ringan. Dan apabila seseorang mengalami kegilaan sebagian partial dan dalam segi-segi lain ia tidak gila dan melakukan kejahatan sebagai akibatnya ia harus dipandang sebagai berada dalam keadaan yang sama terhadap pertanggungjawaban yang mempunyai fakta yang riil.

Menurut Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman, harus disadari bahwa Undang-Undang Mc Naghten bukanlah percobaan atau tes jiwa, sehat atau tidaknya harus dirumuskan sedemikian hingga dapat memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku. Undang-Undang demikian tersebut adalah tes pertanggungjawaban dalam hukum bagi perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan.⁴⁸ Untuk menentukan dasar gila menurut hukum (legal) harus dibuktikan bahwa tertuduh tidak dapat membedakan antara benar dan salah (*right-wrong test*) tes benar benar-salah.⁴⁹

Psikopat juga termasuk suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan sehat jasmani dan pikiran secara umum tetapi memiliki suatu anomali di mana seorang psikopat memenuhi unsur-unsur yang dinyatakan Dr. Hare seorang perumus test PCL-R (*Psychopath Checklist Revised*) yang bisa menentukan apakah seorang mengidap psikopat atau tidak. Psikopat terlihat sebagai seorang yang sehat tapi sakit, dan sebaliknya sakit tapi sehat, maka dari itu sering disebut orang gila tanpa gangguan mental.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

⁴⁸ Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiatri dan Pengadilan*, hlm.142.

⁴⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*, hlm.49.

B. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap kelainan jiwa dan termasuk kedalam kategori psikopat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum berdasarkan Pasal 338 KUHP.
2. Batasan hukum seseorang yang dikatakan psikopat adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan sehat jasmani dan pikiran secara umum. Psikopat terlihat sebagai seorang yang sehat tapi sakit, dan sebaliknya sakit tapi sehat, maka dari itu sering disebut orang gila tanpa gangguan mental. Dalam ilmu hukum itu sendiri psikopat tidak termasuk kedalam kategori gangguan jiwa berat karena memiliki kompetensi psikologis untuk dipertanggungjawabkan secara hukum juga memiliki kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan memanipulasi atau melakukan kebohongan.

C. Saran

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan yaitu terkait Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai penghapusan, pengurangan atau pemberatan pidana. Jika dalam Pasal tersebut status kejiwaan seseorang tidak diatur tegas dan jelas dalam hukum maka akan menimbulkan kekeliruan hukum dikemudian hari. Sehingga penulis memberikan pandangan agar ada perbedaan antara sakit dan kelainan jiwa, hingga muncul suatu kejelasan untuk status kejiwaan tersebut dan terciptanya suatu pengaturan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Andi, Zainal, 1993, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6.

C.ST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dirdjosiswono, Soedjono, 1985, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung.

H.A.K Moch.Anwar, 1982 *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I*, Alumni, Bandung.

Hadisoeparto, Hartono, 1996, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Harahap, M.Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasan Basri Sanin Dt.Tan Pariaman, *Psikiatri dan Pengadilan*.

Hatrik, Hamzah, SH. MH, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Kan, J. van & J.H. Beekhuis, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Moeljanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Poernomo, Bambang, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Pound, Roscoe, 2000, "An Introduction to the Philosophy of Law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar-Maju, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyanto, Dwija, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5, Ereska, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* Alumni, Bandung.
- Salah, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal, Kamus, Makalah Dan Skripsi/Tesis/Disertasi

- Frangky Maitulung, "Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat", Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, No.7 November 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

C. Website

- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5290c5c7b3bd7/bisakah-seorang-psikopat-dipidana?>, diakses pada tanggal 28 April 2015.
- <http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/pengertian-kejahatan-dan-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 28 April 2015.
- <http://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2012/11/pembunuhan.html>, diakses pada tanggal 28 April 2015.
- <http://imron46.blogspot.com/2009/09/teori-dasar-psikopat.html>, diakses pada tanggal 28 April 2015.
- <http://s-hukum.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 April 2015.
- http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_ryan-pembunuh.html, diakses pada tanggal 25 Mei 2015.
- <http://fhujiviolet.blogspot.com/p/psikopat-dengan-skizofrenia.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2015.